

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban diartikan mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (halim, 2004).

Menurut suwardjono (2005), informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (3) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (partono, 2000). Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: (1)

masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta (4) pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah daerah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (badjuri dan trihapsari, 2004). Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Dalam konsep standar pemeriksaan keuangan negara pada bab standar pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan mengenai pengendalian intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan 4 (empat) salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan, artinya informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu:
2. Andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi:
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya:
4. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).

Menurut UU nomor 15 tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada semester 1 tahun 2014, bpk telah memeriksa 456 LKPD tahun 2013. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan semester i tahun 2014 adalah 529. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan pp nomor 71 tahun 2010 yang memberlakukan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah.

Tuntutan perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah harus dijawab dengan perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sumber

Daya Manusia merupakan salah aset yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi akuntansi pada pelaporan keuangan .

Pemanfaatan system informasi akuntansi mungkin mempengaruhi nilai informasi pada pelaporan keuangan pemerintah daerah selain faktor sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 13 peraturan pemerintah (PP) no. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP NO . 11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang update mengenai informasi keuangannya

Hasil penelitian yang ditemukan oleh zetra (2009) dalam mirnayanti (2013) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan system informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki computer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan

secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh dedi (2007) mengenai peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan TI tidak selalu memberikan hasil yang positif, dimana pegawai akan menerima TI. Penggunaan TI hanya sekedar alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan TI tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan skill staf dengan melakukan pelatihan TI secara berkesinambungan dan mengubah budaya *face to face* menjadi *face to technology*. Kondisi ini juga harus didukung dengan kemudahan untuk memperoleh TI dengan harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik. Hasil lainnya juga menunjukkan walaupun pemerintah merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan TI, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan TI. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya rendahnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan maupun peraturan serta masih minimnya dana.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern juga merupakan salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) 1 tahun 2014 yang diterbitkan BPK menyatakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Berdasarkan IHPS 1 tahun 2014, kelemahan atas SPI dikelompokkan atas tiga kategori berikut:

(1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, artinya kelemahan system pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan;

(2) kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, artinya kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa;

(3) kelemahan struktur pengendalian intern, artinya kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human

capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (sugeng dan imam, 2000 dalam sutaryo, (2011). Zuliarti (2012) melakukan penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian indriasari dan nahartyo (2008), rosalin (2011) dan arfianti (2011). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya job description, dan kurang dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan winidyaningrum dan rahmawati (2010) dan nurillah (2014) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sdm berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Teknologi informasi diketahui memiliki banyak manfaat yang ditawarkan, antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (wahana komputer, 2003). Pada penelitian zuliarti (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan indriasari dan nahartyo (2008), rosalin(2011), winidyaningrum dan rahmawati (2010), serta nurillah (2014). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan arfianti (2011) yang menyimpulkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (mahmudi, 2007). Winidyaningrum dan rahmawati (2010) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian intern pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) surakarta, boyolali, sukoharjo, karanganyar, wonogiri, sragen dan klaten. Hasil penelitian menunjukkan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh arfianti (2011), dalam penelitiannya SPI sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian ini SPI sebagai variabel bebas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai informasi pelaporan keuangan, yaitu: indriasari dan nahartyo (2008), winidyaningrum dan rahmawati (2010), arfianti (2011), dan sukmaningrum (2012). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat perbedaan hasil beberapa penelitian di atas telah mendorong untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini difokuskan pada SKPD kabupaten batang dan kabupaten kendal. Alasan penggunaan populasi ini karena provinsi jawa tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2013 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2013 di wilayah

provinsi jawa tengah. Akan tetapi, menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) provinsi jawa tengah ditahun yang sama pula, tidak banyak yang berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Pemberian opini atas LKPD didasarkan pada pertimbangan atas: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) efektivitas pengendalian intern; (3) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan (4) pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang -undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

pemerintah kabupaten demak mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK pada tahun 2013. WDP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten demak serta pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan SAP, pemanfaatan SIA, pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dapat dilihat pada tabel 1.1

Table 1.1.
Hasil penelitian terdahulu (*Reseach GAP*)

Nama Peneliti	Penerapan SAP Terhadap Nilai Informasi laporan keuangan	Pemanfaatan SIA Terhadap Nilai Informasi laporan keuangan	Pengendalian Intern Terhadap Nilai laporan keuangan
M. Ali Fikri Biana Adha Ipnaty (2016)	+/sig	-/tdk sig	+/sig
Adria Pratama Putri (2016)	-/tdk sig	+/sig	+/sig
Asysyhatul Latifah (2015)	+/sig	-/tdk sig	+/sig
Gerry Armando (2013)	-/tdk sig	-/tdk sig	+/sig
Indra Kesuma (2014)	-/tdk sig	-/tdk sig	+/sig
Katty Aryanty Martyna (2014)	-/tdk sig	+/sig	+/sig

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian-penelitian di atas maka penelitian ini mencoba meneliti factor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan dengan cara menghubungkan pengaruh penerapan SAP, Pemanfaatan SIA, pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas mengenai pengaruh penerapan SAP, Pemanfaatan SIA, Pengendalian intern, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan SIA, Pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Pada BPKPAD Kabupaten Demak)”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Namun demikian, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu dianalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan peningkatan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016?
2. Apakah pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016?
4. Apakah penerapan SAP, Pemanfaatan SIA, Pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Untuk menganalisis dan membuktikan pemanfaatan system informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Untuk menganalisis dan membuktikan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Untuk menganalisis dan membuktikan penerapan SAP,Pemanfaatan SIA,Pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah kabupaten demak dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang bersikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian anggaran, anggaran daerah, analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, uraian penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengujian hipotesis, lokasi dan sampel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang berisi tentang uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran yaitu berisi simpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

